

Abstrak

Penelitian ini dilandasi oleh fenomena permasalahan dalam Program CSR kemitraan agribisnis antara PT. Djarum dengan para petani tembakau mitra di Kecamatan Bansari, khususnya setelah pandemi COVID-19. Permasalahan tersebut khususnya meliputi masalah tata niaga yang semakin memberatkan petani mitra, penurunan harga pembelian tembakau secara sepihak, serta penundaan pembelian hasil tembakau oleh perusahaan, juga sistem kredit yang semakin memberatkan bagi petani. Keluhan-keluhan ini tidak hanya datang dari para petani tetapi juga didukung berbagai pemangku kepentingan seperti Pemerintah Daerah, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Masyarakat dan Komunitas Setempat yang juga memiliki andil dalam program CSR kemitraan agribisnis PT Djarum. Hingga pada tahun 2024, permasalahan-permasalahan yang terjadi masih belum dapat diselesaikan dan menyebabkan meningkatnya keluhan khususnya dari para petani atau pemilik lahan tembakau mitra.

Penelitian ini membahas proses dan mengevaluasi keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholder engagement*) dalam implementasi program CSR kemitraan agribisnis PT Djarum di Kecamatan Bansari, Temanggung. Keterlibatan pemangku kepentingan menjadi sangat penting karena konsep ini merupakan elemen kunci dalam keberlangsungan program CSR kemitraan agribisnis, memastikan bahwa semua pihak yang dilibatkan dengan baik untuk tujuan pengembangan program tersebut. Penelitian ini menggunakan teori Mardikanto yang menekankan pentingnya tiga dimensi utama dalam CSR: ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta relevansi nya pada keterlibatan pemangku kepentingan. Evaluasi penelitian ini ditujukan untuk memberikan rekomendasi perbaikan dalam keterlibatan pemangku kepentingan agar keberlanjutan program CSR kemitraan agribisnis PT. Djarum dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap dalam kesejahteraan ekonomi, sosial, serta lingkungan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para stakeholder eksternal PT. Djarum menilai program kemitraan agribisnis di Kecamatan Bansari belum optimal dalam mencapai keberlanjutan dan kesejahteraan yang diharapkan. Aspek ekonomi masih menghadapi kendala seperti tata niaga yang semakin menciptakan ketidakpastian dan beban finansial bagi petani mitra. Dari sisi sosial, kurangnya ruang komunikasi, diskusi, serta pelibatan petani mitra dan stakeholder eksternal lain dalam pengambilan keputusan telah menimbulkan ketidakpuasan dan rasa tidak adil. Antisipasi terhadap aspek lingkungan khususnya dalam menghadapi perubahan cuaca juga menjadi poin yang dikeluhkan karena tidak adanya koordinasi terkait keberlanjutan lingkungan dengan para *stakeholder*, sehingga hasil panen tembakau petani kurang maksimal. Meskipun telah terdapat identifikasi stakeholder engagement sebelumnya, namun implementasinya masih belum mencapai tingkat optimal yang diharapkan. Hal ini terjadi karena kurangnya keselarasan dalam upaya memenuhi kebutuhan dan harapan para stakeholder khususnya dalam program CSR kemitraan agribisnis. Di samping itu, para pemangku kepentingan eksternal menyayangkan kurangnya respons terhadap keluhan-keluhan yang mereka sampaikan, yang belum diikuti dengan tindakan yang konkrit untuk memperbaiki program CSR Kemitraan Agribisnis. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan para pemangku kepentingan terkait keberlanjutan program tersebut.

Kata Kunci: Stakeholder Engagement, Kemitraan Agribisnis, Corporate Social Responsibility

Abstract

This study is motivated by the problematic phenomenon within the agribusiness partnership CSR program between PT. Djarum and its tobacco farmer partners in Bansari Subdistrict, particularly following the COVID-19 pandemic. These issues primarily involve increasingly burdensome trade regulations for partner farmers, unilateral reductions in tobacco purchase prices, delays in purchasing tobacco crops by the company, and a more restrictive credit system for farmers. These grievances are not only voiced by the farmers but are also supported by various stakeholders such as the Regional Government, the Indonesian Tobacco Farmers Association (APTI), local communities, and organizations, all of which have a role in PT. Djarum's agribusiness partnership CSR program. By 2024, these issues remain unresolved, leading to increasing dissatisfaction, especially among farmers or tobacco landowners who are part of the program.

This research discusses and evaluates stakeholder engagement in the implementation of PT. Djarum's agribusiness partnership CSR program in Bansari Subdistrict, Temanggung. Stakeholder engagement is deemed crucial as it constitutes a key element in ensuring the sustainability of the agribusiness partnership CSR program by involving all relevant parties in the development of the program. This study applies Mardikanto's theory, which emphasizes the importance of three main CSR dimensions: economic, social, and environmental, as well as their relevance to stakeholder engagement. The evaluation aims to provide recommendations for improving stakeholder involvement to ensure the sustainability of PT. Djarum's agribusiness partnership CSR program contributes more significantly to the economic, social, and environmental welfare of the community.

The results reveal that external stakeholders of PT. Djarum view the agribusiness partnership program in Bansari Subdistrict as suboptimal in achieving the desired sustainability and welfare outcomes. The economic aspect faces challenges such as trade mechanisms that create uncertainty and financial burdens for partner farmers. From the social perspective, the lack of communication platforms, discussions, and the involvement of partner farmers and other external stakeholders in decision-making processes has resulted in dissatisfaction and a sense of injustice. Environmental concerns, particularly in anticipating weather changes, have also been raised, citing a lack of coordination regarding environmental sustainability among stakeholders, leading to suboptimal tobacco harvests. Despite prior identification of stakeholder engagement strategies, their implementation has yet to reach the expected level of effectiveness due to misalignment in efforts to meet stakeholder needs and expectations, especially within the agribusiness partnership CSR program. Additionally, external stakeholders lament the inadequate response to their complaints, which has not been followed by concrete actions to improve the agribusiness partnership CSR program. This situation has led to dissatisfaction and disappointment among stakeholders regarding the program's sustainability.

Keywords: Stakeholder Engagement, Agribusiness Partnership, Corporate Social Responsibility

